



RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021

I. Pendahuluan

Sungai Barito berfungsi dalam penyediaan air tawar (aquiver), penyedia habitat dan bio-deversiti (plasma nutfah), menjaga sistem di bumi (hidrologi). Posisi Sungai Barito (sekitar equator) yang bermuara ke Laut Jawa dan dekat dengan Selat Makassar mempunyai peran penting dalam menjaga kondisi iklim dunia, khususnya dalam mengendalikan suhu dan tekanan udara sehingga akan mempengaruhi perubahan iklim. Hal ini dibuktikan oleh munculnya anomali cuaca ekstrim dan ketidaknormalan antara musim hujan dan kemarau. Pada awal Tahun 2021 cuaca ekstrim (hujan) terjadi yang menyebabkan hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan mengalami bencana banjir dengan kerugian yang sangat besar baik korban jiwa dan kerusakan bangunan serta infrastruktur jalan dan jembatan. Sampai dengan Tahun 2022 ini bencana banjir, longsor, dan angin puting beliung serta fenomena anomali iklim lainnya masih sering terjadi di Kalimantan Selatan.

Pada Tahun 2021, disamping menghadapi masalah pandemi Covid-19 Varian Delta, Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan juga harus tetap melaksanakan program-program pembangunan. Kinerja perekonomian Kalimantan Selatan masih didukung oleh sektor-sektor dominan masih berperan dalam menyumbang pertumbuhan Kalimantan Selatan, seperti perkebunan dan pertambangan.

Dokumen IKPLHD Tahun 2021 menjadi bagian penting sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup untuk menjadi acuan kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup.

II. Analisis DPSIR

Analisis DPSIR (*Driving Force, Pressure, State, Impact, dan Respons*) adalah sebuah kerangka untuk mengorganisir informasi dan data tentang

kondisi lingkungan. **Driving Force** dapat diartikan sebagai faktor pemicu dari sebuah kondisi guna memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia akan air, pangan, energi, transportasi, tempat tinggal, kesehatan, keamanan, dan status sosial. **Pressure** merupakan tekanan terhadap komponen lingkungan sebagai akibat dari produksi barang/jasa dan konsumsi manusia yang dapat menyebabkan turunnya kualitas hidup. **States** adalah kondisi komponen lingkungan hidup yang mendapat tekanan, antara lain: komponen biofisik-kimia, sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan. **Impact** merupakan akses negatif dari perubahan kondisi/keadaan/sistem lingkungan terutama turunnya daya dukung lingkungan dapat menimbulkan dampak terhadap kualitas hidup manusia, seperti timbulnya kesenjangan sosial, ekonomi dan budaya, dan kesehatan masyarakat. **Response** adalah cara pemerintah daerah dalam menanggapi dampak lingkungan dan biasanya dalam suatu tatanan normatif seperti pengambilan keputusan dan kebijakan dalam skala yang berbeda (Perda atau Pergub) guna mengendalikan dan mengurangi dampak negatif terhadap komponen lingkungan. Analisis DPSIR diarahkan dalam menganalisis matra-matra, yaitu: tataguna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana, perkotaan, dan tata Kelola.

A. Matra Tata Guna Lahan

- Driving Force* : 1 Keperluan manusia akan energi listrik, khususnya energi yang bersumber dari batubara. Faktor pemicu dalam matra tataguna lahan yang terkait dengan pertambangan batubara adalah dikeluarkannya IUP Pertambangan baik pada lahan kering maupun lahan basah (pesisir) yang secara fungsional akan merubah penggunaan lahan.
- 2 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menjadikan sektor pertanian (sub sektor perkebunan) sebagai andalan bagi PAD yang memerlukan lahan yang sangat luas. Perubahan tataguna lahan dalam skala besar (luas) akan dipicu oleh adanya IUP perkebunan dan kehutanan yang berpotensi menyebabkan okupasi lahan dan tumpang tindih lahan dengan masyarakat dan IUP-IUP lainnya.
- Pressure* 1 Tekanan terjadi pada wilayah daratan dalam bentuk perubahan tata guna lahan yang menimbulkan lahan kritis

- 2 Tekanan terjadi pada wilayah pesisir dalam bentuk perubahan tata guna lahan yang menimbulkan kerusakan pada ekosistem terumbu karang, padang lamun dan hutan mangrove

State

Berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Selatan peruntukkan penggunaan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari kawasan lindung seluas 737.734 ha (19,79%) dan kawasan budidaya sebesar 2.990.260 ha (80,21%). Jika dibandingkan dengan SK Menhut No. SK 435/MENHUT-II/2009, kawasan hutan terjadi pengurangan sebesar 41.111 Ha.

Impact

- 1 Bencana alam yang terkait dengan akibat perubahan tata guna lahan antara lain, Banjir, angin puting beliung, dan kebakaran
- 2 Penurunan biodeversitas kawasan pesisir merupakan pengaruh dari pencemaran dan sedimentasi dari aktivitas di darat seperti penggunaan pupuk untuk perkebunan dan pertanian, pertambangan, pertambangan, pelabuhan khusus dan permukiman.

Response

- 1 Pengawasan penataan lingkungan hidup yang dilaksanakan pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang pertambangan dan perkebunan yang taat sebagian besar adalah perusahaan yang telah mengikuti Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper),
- 2 Program Penghijauan (Revolusi Hijau) dilaksanakan dengan penanaman tanaman dalam rangka mempercepat kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem keidupan tetap terjaga yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

B. Matra Kualitas Air

- Driving Force* : 1 Keperluan manusia akan energi listrik, khususnya energi yang bersumber dari batubara. Pertambangan batubara di Kalimantan Selatan sejak Tahun 1990 hingga sekarang sebagian besar masih menggunakan teknik tambang terbuka (*open pit*). Faktor pemicu dalam matra kualitas air yang terkait dengan pertambangan batubara adalah pengelolaan lingkungan yang tidak serius dari pemrakarsa akan menyebabkan penurunan kualitas air.
- 2 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menjadikan sektor pertanian (sub sektor perkebunan) sebagai andalan bagi PAD yang memerlukan lahan yang sangat luas. Kegiatan perkebunan dan kehutanan (HTI) pada tahap awal melakukan pembersihan lahan (*land clearing*) yang menghilangkan tanaman-tanaman penutup menjadi lahan terbuka.
- 3 Kegiatan industri juga dapat menjadi pemicu dalam penurunan kualitas air, dimana limbah cair yang dihasilkan jika tidak memenuhi baku mutu sampai ke sungai maka akan memberikan bahan-bahan pencemar, terutama logam-logam berat, yang akan berdampak pada kesehatan masyarakat.
- 4 Pertambahan jumlah penduduk perkotaan mempunyai konsumwensi terhadap daya tampung dan daya dukung wilayah dan memberikan tekanan yang berat terhadap komponen lingkungan.
- Pressure* 1 Tekanan terjadi pada ekosistem air tawar (rawa, danau, dan sungai) sebagai akibat dari pencemaran air dan sedimentasi.
- 2 Tekanan terjadi pada ekosistem air laut terjadi ekosistem pesisir, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun sebagai akibat dari pencemaran air dan sedimentasi.
- State* 1 Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2021 sebesar 54,75
- 2 Parameter *E. coli* sering kali melebihi baku mutu lingkungan
- 3 Sedimentasi yang tinggi di Muara Barito sehingga menyebabkan pendangkalan

- Impact*
- 1 Dampak ditimbulkan dari perubahan yang kualitas air sungai terjadi terhadap kesehatan masyarakat. Dalam hal kasus pencemaran *E. Coli* pada sungai, dapat menyebabkan timbulnya penyakit yang disebarkan oleh media air.
 - 2 Sedimentasi muara Sungai Barito tetap terjadi dengan besaran yang meningkat, sehingga jika dibiarkan akan mengganggu alur pelayaran yang kemudian akan mengganggu perekonomian Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah.
- Response*
- 1 Pengawasan penataan lingkungan hidup yang dilaksanakan pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang pertambangan dan perkebunan yang taat sebagian besar adalah perusahaan yang telah mengikuti Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper),
 - 2 PROKASIH (Program Kali Bersih) adalah program kerja pengendalian pencemaran air sungai dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas air sungai agar tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
 - 3 Pengerukan alur Sungai Barito merupakan salah satu respon pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menanggulangi masalah sedimentasi di muara Sungai Barito.

C. Matra Kualitas Udara

- Driving Force* : 1 Aktivitas mesin-mesin pabrik atau genset yang menggunakan bahan bakar fosil dan biomassa. Proses pembakaran akan menghasilkan gas atau asap serta partikulat yang akan memasuki udara dari knalpot atau cerobong yang tinggi.
- 2 Kepemilikan kendaraan mobil pribadi dan sepeda motor menyebabkan produksi emisi gas polutan semakin meningkat, sehingga semakin menurunkan kualitas udara ambien.
- Pressure* Sumber pencemar utama berasal dari kegiatan transportasi dan industri disamping kebakaran hutan akan menurunkan kualitas udara ambient.
- State* Kualitas udara di Kalimantan Selatan masih dalam kategori baik (Nilai IKU Tahun 2021 sebesar 89,15)

Impact Polusi udara dari asap kendaraan dapat memberikan efek buruk bagi kesehatan. Asap kendaraan merupakan salah satu penyebab tertinggi polusi udara yang ada di lingkungan sehingga berpotensi menimbulkan penyakit.

Response

- 1 Program pengembangan regulasi, penggunaan bahan bakar alternatif, pengembangan manajemen transportasi, dan pemenuhan emisi gas buang kendaraan bermotor merupakan upaya dalam mengendalikan pencemaran udara.
- 2 Menyediakan layanan transportasi umum berupa bis yang melayani beberapa koridor di wilayah Banjarkabula.

D. Matra Resiko Bencana

Driving Force : 1 Anomali cuaca, curah hujan ekstrem, pada akhir Tahun 2020 hingga awal Tahun 2021 curah hujan dengan intensitas tinggi tercatat pada 13 Januari 2021 sebesar 51 mm dan sebesar 249 mm pada 14 Januari 2021 di Stasiun Meteorologi Syamsudin Noor Banjarmasin. Sementara itu, curah hujan tercatat sebesar 15,9 mm pada 13 Januari 2021 dan 255,3 mm pada 14 Januari 2021 di Stasiun Klimatologi Banjarbaru

2 Keberadaan lahan kritis sebagai dampak dari perubahan tata guna merupakan salah satu faktor resiko dan ancaman munculnya bencana alam, terutama banjir dan tanah longsor

3 Pelanggaran terhadap aturan mendirikan bangunan dan kurangnya pengawasan tentang penataan bangunan, khususnya di wilayah perkotaan, yang menyebabkan terganggunya sistem drainase kota.

Pressure Kerugian dampak dari bencana banjir awal Tahun 2021 sebesar Rp. 1,349 Triliun terdiri dari Rp. 30,446 Miliar (Sektor Pendidikan), Rp. 46,533 Miliar (Sektor Kesehatan dan Perlindungan Sosial), Rp. 604,562 Miliar (Sektor Produktivitas Masyarakat) dan Rp. 216,266 Miliar (Sektor Pertanian)

State Bencana banjir besar dan tanah longsor merendam 101.706 rumah yang dihuni 176.290 KK atau 633.723 jiwa, ratusan ribu orang mengungsi, 1.418 sekolah rusak, 134 buah bangunan rusak.

<i>Impact</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Penyediaan anggaran penanggulangan bencana banjir dan rehabilitasi fisik bangunan yang rusak 2 Timbulnya masalah kesehatan antara lain berawal dari kurangnya air bersih yang berakibat pada buruknya kebersihan diri, buruknya sanitasi lingkungan yang merupakan awal dari perkembangbiakan beberapa jenis penyakit menular
<i>Response</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0805/KUM/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Putting Beliung, dan Gelombang Pasang di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 2 Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0729/KUM/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Putting Beliung, dan Gelombang Pasang di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2022 3 Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0767/KUM/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Pembentukan Pos Komando Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Putting Beliung, dan Gelombang Pasang di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2022

E. Matra Perkotaan

<i>Driving Force</i>	<p>: 1 Jumlah penduduk yang besar sangat berkorelasi dengan jumlah sampah yang dihasilkan.</p> <p>2 Munculnya limbah infeksius dari hasil kegiatan penanganan Covid-19 Varian Delta dengan status LB3</p>
<i>Pressure</i>	<p>Beberapa resiko yang akan dihadapi dalam pengelolaan persampahan, antara lain: kesehatan masyarakat, emisi gas metan dan dioksin, partikulat, dan estetika lingkungan.</p>
<i>State</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Timbulan sampah padat domestik mencapai 766.902 m³/tahun. 2 Tahun 2020 lalu total volume limbah infeksius di Banua tercatat 182.821,3 kilogram, sedangkan di Tahun 2021 hingga bulan Mei 2021 totalnya mencapai 68.983 kilogram.

- | | |
|-----------------|---|
| <i>Impact</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1 Dampak yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah dari mulai dari sumbernya hingga sampai di TPA, dengan jalan menyiapkan infrastruktur, transportasi, dan tenaga kerja khusus untuk mengelola sampah. 2 Pemusnahan limbah infeksius dengan menggunakan incinerator dan/atau dikirim pada pihak ketiga yang berizin. |
| <i>Response</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1 Anggaran pengoperasian TPST Banjarbakula di Banjarbaru 2 Bank sampah yang ada di Kab/kota se Kalimantan Selatan berjumlah sekitar 645 bank sampah dalam upaya pengurangan sampah, khususnya sampah domestik. 3 Kebijakan JAKSTRADA dengan pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan dan pendauran ulang serta neraca penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampah serta pemrosesan akhir sampah. 4 Pemerintah Kalimantan Selatan mengeluarkan regulasi pengelolaan LB3 dari hasil penanganan Covid-19 |

F. Matra Tata Kelola

- | | |
|----------------------|---|
| <i>Driving Force</i> | : Pelayanan prima kepada dunia usaha dalam mengeluarkan izin lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan hidup, dan pelayanan pengaduan masyarakat |
| <i>Pressure</i> | Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan: "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan, sedangkan misi Dinas Lingkungan Hidup, antara lain : meningkatkan kualitas air, meningkatkan kualitas udara, dan meningkatkan tutupan hutan. |
| <i>State</i> | DLH Provinsi Kalsel memiliki sumber daya setara S2 (19 orang), S1 (19 orang), dan Diploma (3 orang), dan SMA (9 orang) |
| <i>Impact</i> | Kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2021, antara lain dalam proses penerbitan izin lingkungan, izin pengelolaan LB3, pemantauan dan pengawasan. |

Response Respon yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kalimantan Selatan antara lain menghasilkan inovasi-inovasi yang lebih bermanfaat dan berguna bagi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup

III. Penentuan Isu Prioritas

Penjaringan isu prioritas lingkungan hidup dalam rangka penyusunan dokumen IKPLHD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 dilakukan dua cara, yakni penjaringan pada tingkat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan dan kegiatan FGD.

Metode yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan terhadap keputusan isu prioritas lingkungan hidup Kalimantan Selatan Tahun 2021 adalah dengan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty (2008). Hasil proses pemilihan menghasilkan ranking atas prioritas berturut-turut adalah bencana banjir (0,212), pengelolaan persampahan (0,206), rendahnya kualitas air sungai (0,202), peningkatan luas lahan kritis (0,197), dan pengelolaan daerah pesisir (0,190).

IV. Inovasi

Inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kalimantan Selatan dalam rangka menjawab isu-isu prioritas yang muncul di Tahun 2021. Penjabaran inovasi juga akan memperhatikan beberapa hal yang terkait dengan isu-isu perubahan iklim, perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumberdaya alam, dan perbaikan tata kelola lingkungan.

Inovasi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah Kalimantan Selatan Tahun 2021 selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 1**.

V. Penutup

Berdasarkan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis DPSIR yang mencakup matra-matra Tata Guna Lahan, Kualitas Air, Kualitas Udara, Resiko Bencana, Perkotaan, dan Tata Kelola telah dilakukan sebagai rangkaian usaha dalam memilih isu-isu prioritas lingkungan hidup daerah;
2. Berdasarkan analisis AHP yang melibatkan tim penyusun dan *stakeholder* dari beberapa instansi/SKPD diperoleh bahwa bencana banjir merupakan isu prioritas utama lingkungan hidup Kalimantan Selatan disusul oleh isu tentang pengelolaan persampahan, rendahnya kualitas air sungai, peningkatan luas lahan kritis, dan pengelolaan daerah pesisir.

Tabel 1. Inovasi pemerintah daerah Kalimantan Selatan Tahun 2021

No.	Tema Inovasi	Dasar Hukum Inovasi	Deskripsi Inovasi
A. Inovasi dalam menjawab isu-isu prioritas Tahun 2021			
1	Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, Dan Gelombang Pasang	Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0729/KUM/2021 Tanggal 15 November 2021 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, Dan Gelombang Pasang Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2022	Penanggulangan bencana banjir besar di Kalimantan Selatan Tahun 2021
2	Pembentukan Pos Komando Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, Dan Gelombang Pasang	Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0767/KUM/2021 Tanggal 1 Desember 2021 Tentang Pembentukan Pos Komando Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, Dan Gelombang Pasang Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2022	Penanggulangan bencana banjir besar di Kalimantan Selatan Tahun 2021
3	Tim Percepatan Pemulihan Lingkungan Pasca Banjir	Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0442kum/2021 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Pemulihan Lingkungan Pasca Banjir Provinsi Kalimantan Selatan	Penanggulangan bencana banjir besar di Kalimantan Selatan Tahun 2021
4	Kaji Cepat Banjir Provinsi Kalimantan Selatan	Kerjasama Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan	Kegiatan untuk mitigasi bencana banjir di Kalimantan Selatan
5	Kajian Pengamanan	Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan	Kegiatan untuk mitigasi bencana banjir di Kalimantan

No.	Tema Inovasi	Dasar Hukum Inovasi	Deskripsi Inovasi
	Lingkungan Hidup (<i>Environmental Safeguard</i>) Berbasis Ekoregion di Provinsi Kalimantan Selatan	Tata Lingkungan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Selatan
6	Program Sungai Martapura Bungas	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/0733//Kum/2021 Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Percepatan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Sub Daerah Aliran Sungai Martapura Melalui Program Sungai Martapura Bungas Tahun 2021	Program unggulan untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan Sub Daerah Aliran Sungai Martapura
7	Penyusunan Rencana Aksi Kolaboratif Mewujudkan Sungai Martapura yang Bersih, Unggul dan Asri	Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan dengan SKSG Universitas Indonesia	Mewujudkan Sungai Martapura yang Bersih, Unggul dan Asri adalah mengembalikan fungsi, nilai, dan keindahan Sungai Martapura sebagai urat nadi pembangunan daerah Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar serta Kalimantan Selatan secara umum
8	Identifikasi Sumber/Beban Pencemar Sungai Martapura Tahun 2021	Pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021	Kegiatan ini memberikan pedoman dan arahan dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman, pelaksanaan dan pengelolaan dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah, serta memberikan pilihan pada pengambilan keputusan mengenai kebijakan, pilihan teknologi, strategi penanganan dan sistem pengelolaan air

No.	Tema Inovasi	Dasar Hukum Inovasi	Deskripsi Inovasi
9	Lomba Bidang Pengembangan Permukiman	Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 188.4/ - Kim.2/Disperkim/2021 Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Kampanye / Lomba Bidang Pengembangan Permukiman Tahun Anggaran 2021	Lomba Poster Ini Dilaksanakan Sebagai Salah Satu Upaya Memberikan Edukasi Mengenai Pentingnya Penerapan Sistem Sanitasi Yang Baik Akan Menciptakan Permukiman Yang Layak Kepada Masyarakat Melalui Kreativitas
10	Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat	Pagu anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021	Kabupaten Kota yang mengikuti : Kab.Tapin, Kab.Tanah Bumbu, Kab.Tabalong, Kab.Banjar, Kab.Hulu Sungai Selatan dan Kota Banjarbaru
11	Penilaian Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS)	Pagu anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021	Kabupaten Kota yang mengikuti : Kab.Tanah Laut, Kab.Tapin, Kab.Tanah Bumbu, Kab. Kotabaru, Kab.Tabalong, Kab.Banjar, Kab.Hulu Sungai Selatan dan Kota Hulu Sungai Utara
12	Implementasi 5 Pilar STBM di 13 Kabupaten Kota	Pagu anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021	Percepatan ODF di 13 Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
13	Pengelolaan Intervensi Kesling	Pagu anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021	Pendampingan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa untuk Teknologi Tepat Guna
14	Gerakan Revolusi Hijau	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Gerakan Revolusi Hijau	Suatu gerakan untuk melakukan penghijauan di Kalimantan Selatan
15	Gerakan Revolusi Hijau	Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0410/KUM/2021 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan	Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Tema Inovasi	Dasar Hukum Inovasi	Deskripsi Inovasi
		Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Gerakan Revolusi Hijau	Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Gerakan Revolusi Hijau
16	e-Service SIFORESTKA (Sistem Informasi Kehutanan Kalimantan Selatan)	Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 75/Kpts/Dishut Tentang Penunjukan Dan Penetapan Operator Pengelola E-Service Siforestka (Sistim Informasi Kehutanan Kalimantan Selatan) Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan	Penghimpunan data dan informasi kehutanan guna mendukung pembangunan kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan
17	Dewan Pertimbangan Proper	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/0648//Kum/2021 Tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021	Dewan Pertimbangan PROPER Provinsi Kalimantan Tahun 2021
18	Pemenang Proper	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/0774/Kum/2021 Tentang Penetapan Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Provinsi Kalimantan Tahun 2021	Pelaksanaan PROPER Provinsi Kalimantan Tahun 2021
19	Penanganan Sampah Domestik Perkantoran	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/0685/Kum/2021 Tentang Penetapan Hasil Penilaian Perkantoran Ramah Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021	Lomba Perkantoran Ramah Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021
20	Tim Penilai Pengelola Sampah Berbasis Masyarakat	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/0711//Kum/2021 Tentang Pembentukan Tim Penilai Pengelola Sampah Berbasis Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan	Pembentukan Tim Penilai Pengelola Sampah Berbasis Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021

No.	Tema Inovasi	Dasar Hukum Inovasi	Deskripsi Inovasi
21	Pemenang Pengelola Sampah Berbasis Masyarakat	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/0758/Kum/2021 Tentang Penetapan Pemenang Hasil Penilaian Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021	Pemenang lomba Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021
22	Sekolah Adiwiyata	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/0715//Kum/2021 Tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021	Sekolah Adiwiyata Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021
23	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2038	Mewujudkan keterpaduan pola ruang laut dan darat yang efisien dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan wilayah perdagangan dan jasa berbasis industri maritim

B. Inovasi yang terkait dengan isu-isu perubahan iklim, perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumberdaya alam, dan perbaikan tata kelola lingkungan

1	Mitra Proklam	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/0726//Kum/2021 Tentang Pembentukan Mitra Program Kampung Iklim Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021	Kegiatan PROKLIM Tahun 2021
2	Penerima Penghargaan Apresiasi Program Proklam	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/0735//Kum/2021 Tentang Penetapan Penerima Penghargaan Apresiasi Program Kampung Iklim Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021	Kegiatan PROKLIM Tahun 2021
3	Desa Sasangga Banua	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/0727//Kum/2021 Tentang Desa Sasangga Banua Kalimantan Selatan Tahun 2021	Kegiatan untuk mempersiapkan masyarakat desa dalam menghadapi perubahan iklim
4	Penghargaan Sasangga Banua	Peraturan Gubernur Nomor 053 Tahun 2021 Tentang Penghargaan Sasangga Banua	Kegiatan untuk mempersiapkan masyarakat desa dalam menghadapi

No.	Tema Inovasi	Dasar Hukum Inovasi	Deskripsi Inovasi
			perubahan iklim
5	Penghargaan Sasangga Banua	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/0714//Kum/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 188.44/0435/Kum/2021 Tentang Penetapan Peraih Penghargaan Sasangga Banua Dalam Rangka Hari Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021	Kegiatan untuk mempersiapkan masyarakat desa dalam menghadapi perubahan iklim
7	Bus BRT Banjarbakula	Pagu anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021	Terobosan pertama untuk menggunakan transportasi umum di Kalimantan Selatan

Sumber : DLH Provinsi, SKPD, dan Biro Hukum Kalimantan Selatan